

POHON KINERJA

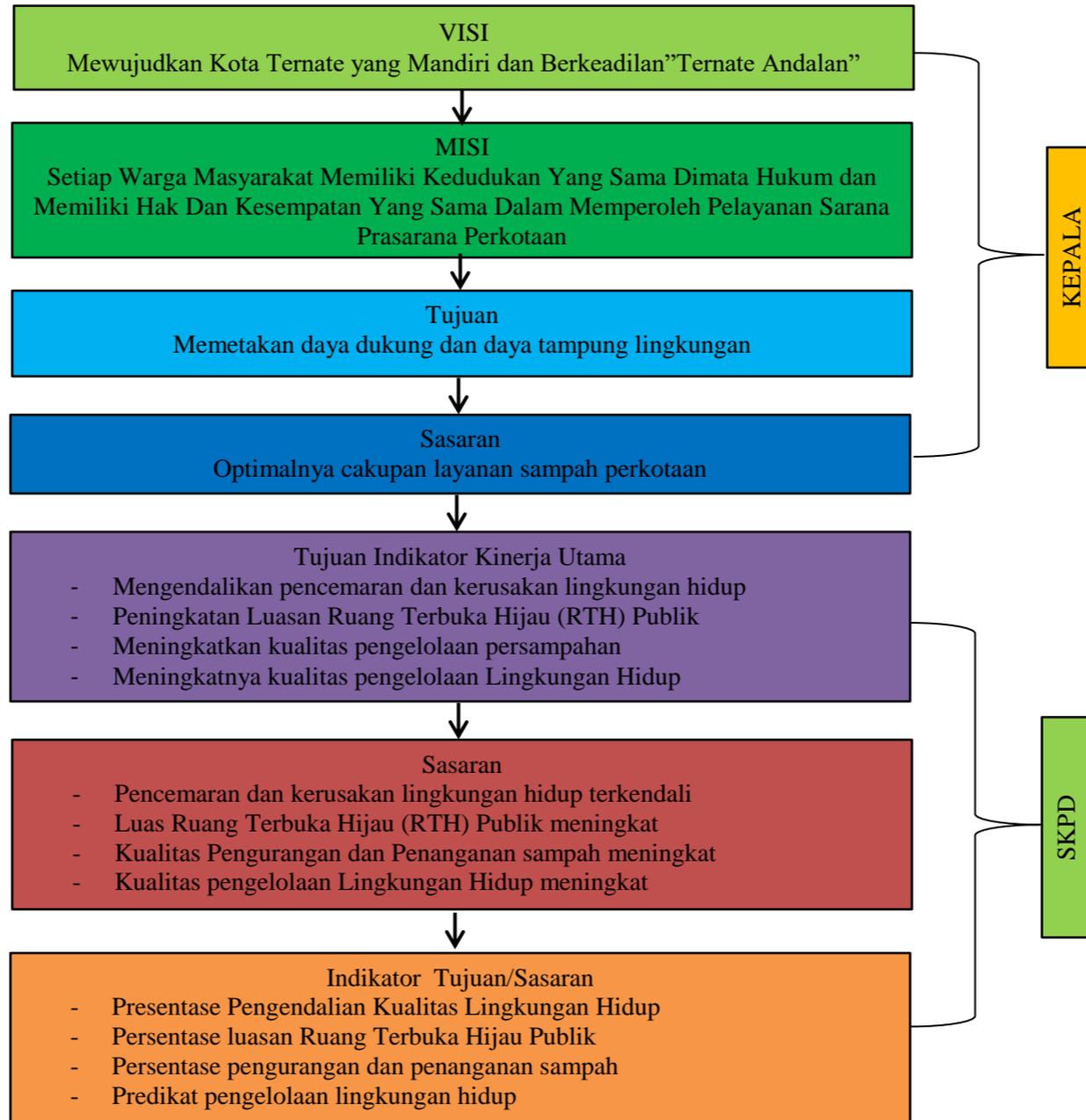
TAHUN 2024

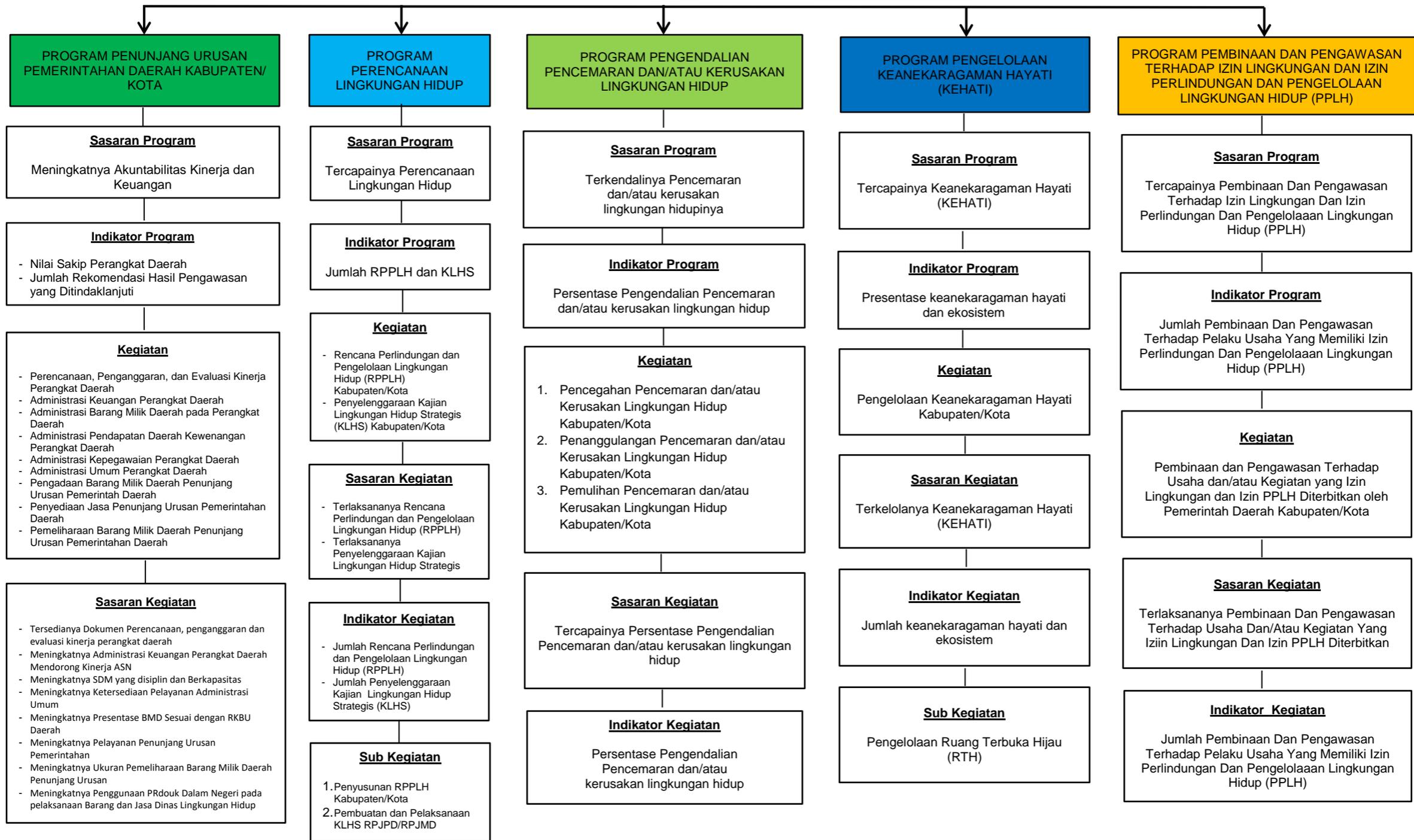
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TERNATE**

Alamat : Jalan Cengkeh Afo Kel. Marikurubu
Kec. Kota Ternate Tengah
Maluku Utara

PHOHON KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE TAHUN 2024





Indikator Kegiatan

- Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
- Persentase Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah
- Tingkat disiplin Aparatur
- Jumlah Pelayanan Administrasi Umum
- Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah
- Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah
- Presentase penggunaan Produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa Dinas Lingkungan Hidup.

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
10. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
12. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
13. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan bahan logistik kantor
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
22. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sasaran Sub Kegiatan

Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan RPPLH dan KLH

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah dokumen RPPL di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Propinsi
2. Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun

Sub Kegiatan

1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
4. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
3. Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
4. Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi
5. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan

Indikator Sub Kegiatan

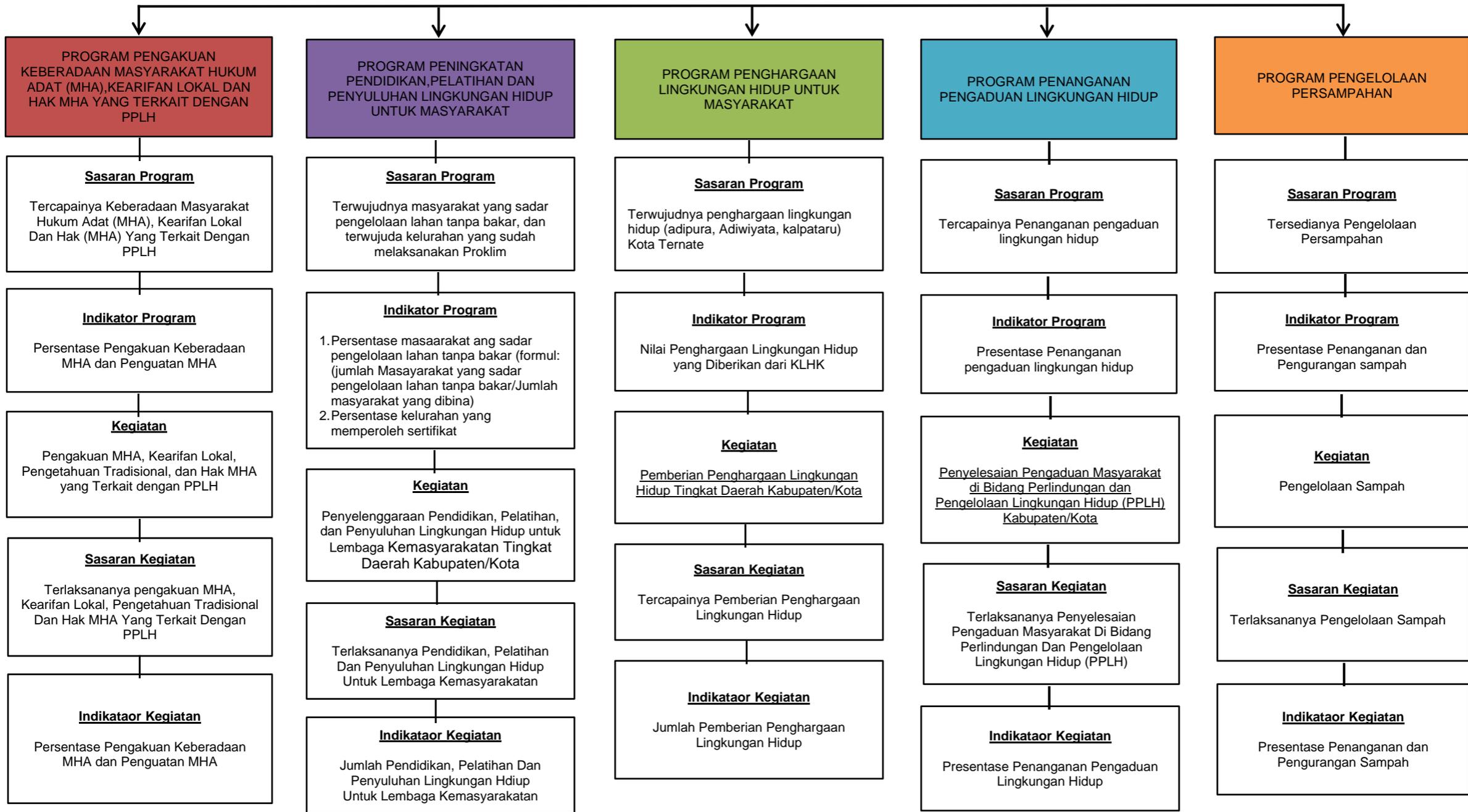
Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan
2. Jumlah badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi



Sub Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan
1. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

Indikator Sub Kegiatan
1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat

Sub Kegiatan
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

Sub Kegiatan
1. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
2. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan
1. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
2. Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub Kegiatan
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3. Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota
4. Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
5. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah

Indikator Sub Kegiatan
1. Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
3. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
4. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
5. Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TERNATE



MUHAMMAD STAFELI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690707 199703 1 005